

## **BAB II**

# **KONFLIK DALAM NEGERI MESIR SERTA KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PRESIDEN MUHAMMAD MURSI**

Pada bab ini akan dibahas kondisi dalam negeri Mesir mengenai berbagai konflik yang terjadi pasca Muhammad Mursi dilantik sebagai Presiden. Tidak hanya itu, pada bab ini juga mengulas tentang berbagai kebijakan Muhammad Mursi selama menjabat sebagai Presiden Mesir, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri terkait masalah politik, sosial, ekonomi, militer, serta hubungan/kerjasama Mesir dengan negara – negara lain.

### **A. Konflik Dalam Negeri Mesir**



Sumber : (HaloKawan, 2019)

Setelah keberhasilan Muhammad Mursi menjadi Presiden. Terdapat beberapa masalah dalam negeri baik dari bidang ekonomi, sosial dan politik. Hal tersebut terlihat ketika Presiden Muhammad Mursi mengeluarkan dekrit Presiden 22 November 2012 yang menjadi awal

kekecewaan rakyat Mesir.<sup>22</sup> Kekecewaan tersebut membuat hilangnya harapan rakyat Mesir terhadap roda pemerintahan yang baru dengan berasaskan demokrasi. Ketidaksesuaian pandangan antara rakyat Mesir dengan Presiden Muhammad Mursi membuat berbagai konflik yang terjadi di dalam negeri Mesir.

Keadaan negara Mesir saat itu sangat tidak stabil dan mengakibatkan rakyat Mesir terpecah belah. Perpecahan rakyat Mesir tersebut membuat perselisihan antara pendukung Mesir dan juga penentang Mesir. Tidak hanya itu perselisihan juga terjadi antara partai sekuler – nasionalis dengan agamis dan garis moderat dan garis keras.<sup>23</sup> Dikarenakan dalam perselisihan tersebut membuat berbagai korban jiwa, sehingga pada tanggal 2 Desember 2012 Presiden Muhammad Mursi mengumumkan kesiapan negara untuk menggelar referendum nasional.<sup>24</sup>

Dalam referendum tersebut masyarakat dituntut berpartisipasi dalam menerima ataupun menolak konstitusi baru tersebut.<sup>25</sup> Akan tetapi pengesahan tersebut membuat demonstrasi dari berbagai pihak. Pihak – pihak tersebut ialah dari kubu liberal, sekular, dan kristen. Pandangan dari berbagai pihak tersebut terhadap perubahan konstitusi tersebut terlalu dipaksakan. Karena adanya perbedaan pandangan tersebut maka pada tanggal 4 Desember 2012, sejumlah surat kabar tidak terbit sebagai aksi protes terhadap rancangan konstitusi Mesir.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Trias Kunchayono, Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm 24.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 24.

<sup>24</sup> Hafidz, Muftisany, "Mursi Umumkan Referenduk Konstitusi", <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/02/mee1ku-mursi-umumkan-referendum-konstitusi.html>.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> BBC Indonesia, "Aksi Boikot sejumlah surat kabar Mesir", [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/2014\\_Mesir\\_koran.html](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/2014_Mesir_koran.html).

Kondisi Mesir semakin parah dengan adanya beberapa bentrokan yang terjadi, seperti pada tanggal 5 Desember 2012 terjadinya bentrokan antara polisi dengan pengunjuk rasa yang menentang konstitusi baru tersebut dan juga menolak adanya perluasan kekuasaan Presiden Muhammad Mursi di Kairo.<sup>27</sup> Pada tanggal 6 Desember 2012 kantor pusat Ikhwanul Muslimin di Kairo diserang dan dibakar oleh Ikhwanul Muslimin di Kairo. Dengan adanya berbagai konflik tersebut tidak membuat pelaksanaan referendum terhambat, bahkan referendum berjalan secara aman, lancar dan jujur. Pada referendum tersebut rakyat Mesir menggunakan hak politiknya pada 25 Desember 2015 dengan hasil perolehan 63,8 % mendukung dan 32,2% menolak.<sup>28</sup>

Konflik yang terjadi di Mesir tersebut telah memasuki kata krisis karena telah melakukan tindak kekerasan yang dilakukan secara terang – terangan dengan membunuh, serta menyingkirkan pihak lawan. Hubungan antara rakyat dengan Presiden pun semakin memburuk dengan mulainya perlawanan kepada pemimpinnya dengan tindakan kekerasan dan demonstrasi. Kejadian itu terlihat bahwa hasil referendum tidak membuat kondisi negara Mesir menjadi stabil. Pada tanggal 25 Januari 2013, ratusan rakyat memperingati ulang tahun kedua revolusi penumbangan rezim Hosni Mubarak dengan kembali ke Tahrir Square dan menentang keputusan referendum. Konflik yang terjadi semakin memanas ketika Muhammad Mursi melantik sembilan menteri baru<sup>29</sup> dalam kabinetnya

---

<sup>27</sup> BBC Indonesia, "Mesir: Protes anti Presiden Morsi dwarnai bentrokan", [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121205\\_morsi\\_Mesir.html](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121205_morsi_Mesir.html).

<sup>28</sup> Ruslan Burhani, "63,8 persen rakyat Mesir mendukung konstitusi baru", <http://www.antarane.ws.com/berita/350233/638-persen-rakyat-Mesir-dukung-konstitusi-baru.html>.

<sup>29</sup> Ajeng Ritzki Pitakasari, "Rombak Kabinet, Mursi Angkat 9 Menteri Baru" <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/05/07/mmfr6t-rombak-kabinet-mursi-angkat-9-menteri-baru.html>.

dan mengganti sejumlah posisi penting seperti kementerian Ekonomi.<sup>30</sup>

Konflik lainnya yang terjadi didalam negeri Mesir ialah ketika para pemilik SPBU tidak menjual BBMnya yang mengakibatkan harga BBM menjadi sangat mahal. Hal tersebut dikarenakan beberapa pemilik SPBU ialah kalangan yang memihak Mubarak dan merekapun bergabung dalam mendukung strategi melengserkan Presiden Muhammad Mursi. Para pemilik SPBU tersebut tidak menjual BBMnya dengan alasan adanya kelangkaan BBM. Padahal pihak Pertamina versi Mesir memproduksi BBM dalam jumlah yang sama dengan yang diproduksi sebelumnya sesuai kebutuhan rakyat Mesir, sehingga tidak mungkin terjadinya kelangkaan.<sup>31</sup>

Menanggapi konflik – konflik yang terjadi di negara Mesir, sebenarnya Presiden Muhammad Mursi telah mengupayakan dalam menstabilkan kondisi negara, seperti melakukan kebijakan – kebijakan untuk meningkatkan ekonomi Mesir. Hal ini pun terlihat pada produksi gandum yang sebelumnya hanya 20% kini meningkat sampai 60%.<sup>32</sup> tidak hanya itu Presiden Muhammad Mursi pun berusaha melakukan komunikasi dan meminta pendapat dengan pihak oposisi mengenai masalah maupun kebijakan Presiden Muhammad Mursi. Akan tetapi pihak oposisi menolak bentuk kerjasama ataupun diskusi yang terkait dengan permintaan Presiden Muhammad Mursi. Pihak oposisi pun malah memutar balikan fakta bahwa Presiden Muhammad Mursi tidak pernah mengajak oposisi dalam membicarakan kondisi negara dan merumuskan kebijakan untuk Mesir.

---

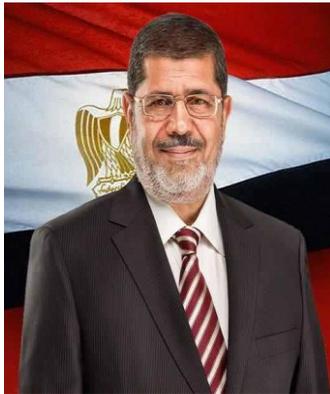
<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> <http://www.kompasiana.com/herilaregrage/awal-jatuhnya-Presiden-Mesir-mursi-bangkitnya-militer>.

<sup>32</sup> [www.forum.co.id/thread-66974-Mesir](http://www.forum.co.id/thread-66974-Mesir).

Dalam hal ini oposisi memegang peranan yang sangat penting dalam mengupayakan usaha melengserkan Presiden Muhammad Mursi. Berbagai konflik yang terjadi di Mesir ketika Presiden Muhammad Mursi memimpin merupakan suatu rencana rapi yang dilancarkan oleh pihak oposisi.

## **B. Kebijakan – Kebijakan Muhammad Mursi**



(Sumber : Wikipedia.com)

Kabar kemenangan Muhammad Mursi merupakan hal yang menggembirakan bagi sebagian penduduk Mesir. Akan tetapi ada hal yang lebih penting bagi Muhammad Mursi setelah ia dilantik sebagai Presiden. Adanya revolusi 2011 menyebabkan beberapa kerugian dalam bidang sosial ekonomi serta stabilitas keamanan. Untuk itu Muhammad Mursi segera merancang beberapa kebijakan yang terkait dalam masalah tersebut. Tidak hanya dalam masalah sosial ekonomi, Presiden Muhammad Mursi juga merancang kebijakan untuk kemiliteran dan juga politik lainnya.

### **1. Kebijakan Politik Muhammad Mursi**

Kebijakan politik pemerintahan merupakan salah satu hal yang paling penting dipikirkan oleh

Muhammad Mursi setelah terpilihnya ia menjadi Presiden. Beberapa hal yang dikeluarkan oleh Presiden Muhammad Mursi ialah :

a. Menghidupkan Kembali Parlemen

Untuk menegaskan keudukannya sebagai Presiden, Muhammad Mursi langsung berpidato setelah ia dilantik sebagai Presiden. Dalam pidato tersebut Muhammad Mursi menyampaikan bahwa akan melakukan usaha dalam pembebasan seorang Ulama Mesir yang bernama Syaikh Umar Abdurrahman yang ketika itu masih dalam tahanan Amerika. Tidak hanya itu, pada tanggal 10 Juli 2012, Presiden Muhammad Mursi menghidupkan kembali parlemen yang telah dibekukan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut bertujuan untuk hidupnya kembali pemerintahan sipil serta menekan dominasi militer.<sup>33</sup>

b. Membentuk Kabinet Baru

Kebijakan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Presiden Muhammad Mursi ialah melantik para menteri pada kabinet baru yang telah dibentuk dan dilaksanakannya. Namun pada posisi Menteri Pertahanan, Presiden Muhammad Mursi tetap memilih Marsekal Husein Tantawi yang telah menjadi Menteri Pertahanan selama lebih dari 20 tahun. Kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang telah dikompromikan sebelumnya dengan pihak militer yang berkuasa. Kemudian pada posisi – posisi strategis dalam pemerintahan dipimpin oleh *Freedom and*

---

<sup>33</sup> A.M. Waskito, Air Mata Presiden Mursi: Tragedi Kudeta Militer 3 Juli 2013, Jakarta: Al-Kautsar, 2013, hlm 5-6.

*Justice Party*. Namun hal tersebut sempat membuat kecemburuan dari beberapa kalangan sekuler. Hal tersebut ditanggapi tegas oleh Presiden Muhammad Mursi dengan mengatakan bahwa Presiden Muhammad Mursi memilih bukanlah berdasarkan ideologi, namun berdasarkan kompetensi.

c. Membebaskan Tahanan Militer

Presiden Muhammad Mursi membebaskan 572 tahanan militer yang terlibat dalam revolusi 25 Januari. Banyaknya tahanan tersebut dikarenakan banyaknya demonstran yang ditangkap oleh militer. Sehingga, ketika Muhammad Mursi menjadi Presiden, ia langsung membebaskan para tahanan yang sebagian besar berasal dari anggota Ikhwanul Muslimin.

d. Dekrit Presiden dan Referendum

Tanggal 22 November 2012, Presiden Muhammad Mursi mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya ialah pemecatan Jaksa Agung. Sebulan setelah mengeluarkan dekrit tersebut, Presiden Muhammad Mursi menggelar referendum untuk memutuskan Konstitusi Baru yang akan menjamin Presiden Muhammad Mursi tidak mudah dijatuhkan oleh Jaksa Agung.

e. Memilih Anggota Penasehat

Pada tanggal 27 Agustus 2012, Presiden Muhammad Mursi memilih 21 anggota penasehat, yang terdapat 3 orang wanita serta 2 orang penganut Kristen. Hal itu menunjukkan politiknya mengakomodir para kaum wanita dan penganut minoritas Kristen.

## 2. Kebijakan Sosial ekonomi Muhammad Mursi

Pasca terjadinya revolusi yang berada di Mesir, negara Mesir mengalami permasalahan di sosial ekonomi. Hal tersebut menjadikan tugas besar Presiden Muhammad Mursi dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi negara yang dipimpinnya. Dalam menstabilkan sosial ekonomi tersebut, Presiden Muhammad Mursi membuat kebijakan – kebijakan yang antara lain:

### a. Kebijakan Pariwisata dan Terusan Suez

Kekuatan sumber perekonomian Mesir terlihat pada sektor Pariwisata dan Terusan Suez. Adanya piramida dan objek wisata lainnya merupakan sumber pemasukan negara. Terusan Suez pun menduduki posisi paling penting dalam dunia perekonomian Internasional. Untuk itu Presiden Muhammad Mursi melakukan usaha peningkatan terhadap potensi yang dimiliki Mesir tersebut.

### b. Meminjam Dana Moneter Internasional

Presiden Muhammad Mursi telah melakukan usaha peminjaman dari Dana Moneter Internasional senilai 4,8 miliar dollar.<sup>34</sup> Hal tersebut dilakukan oleh Presiden Muhammad Mursi dalam menyelamatkan perekonomian yang saat itu sedang mengalami krisis di negara Mesir.

### c. Pengurangan Subsidi

Untuk mengembalikan kestabilan ekonomi Mesir, Presiden Muhammad Mursi pun melakukan pengurangan terhadap subsidi energi. Pengurangan subsidi tersebut sebanyak

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 102.

22% dari total pengeluaran pemerintahan pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Juni.<sup>35</sup>

d. EBDA

*Egyptian Business Development Association* (EBDA) merupakan asosiasi yang fokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur Mesir yang saat itu sedang melemah. Asosiasi tersebut didirikan oleh Ikhwanul Muslimin untuk menopang kekuasaan Presiden Muhammad Mursi.

e. Program 100 Hari

Kebijakan Presiden Muhammad Mursi yang paling fenomenal dan banyak menarik perhatian rakyat Mesir maupun Dunia Internasional adalah kebijakan yang dikenal dengan “Program 100 hari Presiden Muhammad Mursi”. Presiden Muhammad Mursi mengerahkan rakyat Mesir untuk bersama – sama dengan para eksekutif di berbagai provinsi dan kota untuk mewujudkan program “Negeri Bersih” yang merupakan salah satu unggulan dari program 100 hari Presiden Muhammad Mursi. Mengenai program 100 hari ini, Presiden menyampaikannya langsung di depan ratusan ribu warga Mesir yang berkumpul di Stadion Kairo, dalam rangka hari peringatan penyerbuan yang sukses oleh Militer Mesir dari Terusan Suez pada tahun 1972, yang dikenal dengan perang Oktober melawan Israel. Program 100 hari Presiden Muhammad Mursi fokus pada isu – isu keamanan, pasokan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

energi pangan (roti), kebersihan jalan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas di Mesir.

#### f. Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan yang dilakukan Presiden Muhammad Mursi dalam menjamin kesejahteraan sosial ialah dengan meningkatkan tunjangan sosial bagi PNS, pensiunan dan perwira angkatan bersenjata sebesar 15%. Tidak hanya itu, Presiden Muhammad Mursi juga meningkatkan jaminan sosial kepada pensiunan menjadi tiga ratus pound yang sebelumnya hanya dua ratus pound.<sup>36</sup>

### 3. Kebijakan Terhadap Militer dan Lawan Politik

Sebelum Muhammad Mursi menjadi Presiden, pihak militer merupakan pihak yang paling berkuasa di dalam sistem pemerintahan negara Mesir. Terlihat bahwa militer tidak hanya bertanggung jawab mengenai keamanan negara, tetapi juga berperan dalam perpolitikan. Ketika Muhammad Mursi dilantik sebagai Presiden, pihak militer merasa sangat tidak rela untuk memberikan kekuasaannya kepada Presiden Muhammad Mursi.

Hal itu pun ditandai dengan adanya persaingan antara militer dengan Ikhwanul Muslimin. Pihak militer tidak ingin pemerintahan yang berada di Mesir jatuh ke tangan kaum Islamis. Akan tetapi Presiden Muhammad Mursi mengingatkan kembali bahwa militer harus menghormati keinginan rakyat dalam adanya revolusi yang terjadi di Mesir, pihak militer harus kembali pada tugasnya yaitu mempertahankan bangsa dan perbatasan. Untuk

---

<sup>36</sup> Abu Ghazzah, "Cahaya Kebangkitan dari Negeri Anbiya", Jakarta: Maktaba Gaza, 2012, hlm.72.

mempertahankan hubungan yang baik dengan militer, Presiden Muhamamd Mursi pun memberikan kebebasan terhadap militer dengan mempertahankan posisi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Marsekal Hussein Tantawi sebagai upaya kompromi militer.

#### 4. Kebijakan Luar Negeri Muhammad Mursi

##### a. Kunjungan Perdana Presiden Muhammad Mursi ke Arab Saudi

Selama dua hari Presiden Muhammad Mursi berada di Arab Saudi dan secara khusus bertemu dengan Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Pertemuan Presiden Muhammad Mursi dengan Raja Abdullah membahas tentang kerjasama kedua negara tersebut dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, maupun perihal keamanan di kawasan Timur Tengah sendiri. Keduanya juga membicarakan tentang perkembangan terkini di Timur Tengah dan yang terpenting adalah penguatan untuk saling bekerjasama di Semenanjung Arabia.<sup>37</sup>

##### b. Kebijakan Politik Luar Negeri Terhadap Palestina

Pada tahun 2012, saat Muhammad Mursi menjadi pemimpin Mesir, perbatasan Mesir – Palestina kembali dibuka, dan rakyat Palestina diizinkan untuk memasuki Mesir tanpa visa. Sembari membela hak – hak rakyat Palestina, Mesir dengan dukungan pihak pertahanan terus mengkritik operasi militer yang dilakukan Israel di Gaza. Perbatasan Rafah dibuka selama 12 jam, dan dibuka

---

<sup>37</sup> Hafidz Muftisani (2012). Mursi Lakukan Lawatan Pertama ke Arab Saudi. <http://www.republika.co.id>. diakses Kamis, 20 April 2017.

enam kali dalam seminggu, dan penduduk Gaza yang berusia antara 18-40 tahun harus melapor untuk dapat melintasi perbatasan tersebut, sementara wanita dan anak – anak tidak perlu melapor. Mereka yang menggunakan perbatasan untuk tujuan berdagang dalam skala besar masih dipertimbangkan untuk dapat melintasi perbatasan tersebut.<sup>38</sup>

c. Kebijakan Luar Negeri Mesir Terhadap Negara - Negara di Afrika

Presiden Muhammad Mursi berkunjung ke Ethiopia dan ikut serta dalam pertemuan puncak negara – negara Afrika di Adis Adaba. Mesir pasca revolusi 2011 memang menjadikan negara – negara Afrika sebagai prioritas kunjungan luar negeri. Presiden Muhammad Mursi bertemu dengan sejumlah pemimpin di kawasan Afrika, diantaranya adalah Uganda, Sudan Selatan, Sudan, Afrika Selatan, Tanzania, Rwanda, Somalia, dan Chad. Presiden Muhammad Mursi bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ethiopia. Presiden menegaskan bahwa Sungai Nil memiliki peran penting bagi masyarakat sekitarnya termasuk Ethiopia. Mesir berkomitmen memberikan sistem dan teknologi pengairan yang memadai. Presiden Muhammad Mursi juga berhasil meyakinkan dan melobi pimpinan negara – negara Arab, termasuk keberhasilannya melobi Presiden Sudan, Umar Basyir sehingga wartawati Mesir,

---

<sup>38</sup> Iskandar, (2014), “ Dukungan Mesir terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina 2011-2013”, Jurnal Online Mahasiswa, vol. 1, no. 2, Riau: FISIP UNRI, hlm. 4.

Syaima' Adil dibebaskan dan pulang ke Mesir bersama – sama dengan pesawat kepresidenan.<sup>39</sup>

d. Kebijakan Luar Negeri Terhadap Amerika Serikat dan Israel

Presiden Muhammad Mursi memilih arah politik yang berbeda dari Presiden sebelumnya. Presiden Muhammad Mursi lebih mengakomodasi kepentingan Palestina dibandingkan dengan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Israel. Konsekuensi yang harus ditanggung adalah pemerintah Mesir dapat dipastikan tidak lagi menerima bantuan rutin dari AS yang setiap tahun bisa mencapai sekitar 1,5 miliar dollar. AS sudah rutin memberikan bantuan tersebut sejak penandatanganan perjanjian damai Camp David sebagai imbalan untuk Mesir yang mau berdamai dengan Israel. Jika bantuan itu diberhentikan, maka akan sangat memberi pengaruh buruk terhadap kondisi ekonomi Mesir yang tidak stabil pasca revolusi. Jalan keluar yang harus dipilih Presiden Muhammad Mursi adalah dengan melakukan kompromi politik, tentu saja disesuaikan dengan arah kebijakan politik Presiden sendiri demi memuluskan jalan pemerintahannya ke depan.

---

<sup>39</sup> Abu Ghazzah, "Cahaya Kebangkitan dari Negeri Anbiya", Jakarta: Maktaba Gaza, 2012, hlm. 77.